

**PENGAWASAN TERHADAP JAKSA DALAM PELAKSANAAN SISTEM
PERADILAN PIDANA**

**(Studi Putusan Nomor: 08/Pid.sus/TPK/2012/PN.Bdg dan Putusan Nomor:
1147/Pid.B/2009/PN.Jkt.Ut)**



**Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata I
Pada Jurusan Hukum Fakultas Hukum**

Oleh :

WAHYU WIDODO

C 100.140.038

**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2018**

HALAMAN PERSETUJUAN

**PENGAWASAN TERHADAP JAKSA DALAM PELAKSANAAN SISTEM
PERADILAN PIDANA**

**(Studi Putusan Nomor: 08/Pid.sus/TPK/2012/PN.Bdg dan Putusan Nomor:
1147/Pid.B/2009/PN.Jkt.Ut)**

PUBLIKASI ILMIAH

Oleh:

WAHYU WIDODO

C 100 140 038

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

Pembimbing



(Kuswardani, S.H, M.Hum)

NIK/NIDN. 471/0618026302

HALAMAN PENGESAHAN

**PENGAWASAN TERHADAP JAKSA DALAM PELAKSANAAN SISTEM
PERADILAN PIDANA**

**(Studi Putusan Nomor: 08/Pid.sus/TPK/2012/PN.Bdg dan Putusan Nomor:
1147/Pid.B/2009/PN.Jkt.Ut)**

Oleh:

WAHYU WIDODO

C 100 140 038

Telah dipertahankan didepan Dewan Penguji

Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pada hari Senin, 17 Desember 2018

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji

1. Kuswardani, S.H, M.Hum

(Ketua Dewan Penguji)

2. Muchamad Iksan, S.H, M.H

(Anggota I Dewan Penguji)

3. Hartanto, S.H, M.Hum

(Anggota II Dewan Penguji)

()
()
()

Mengetahui

Dekan fakultas hukum

Universitas muhammadiyah Surakarta



(Prof. Dr. Khudzaifah Dimyati, S.H, M.Hum)

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam publikasi ilmiah tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah dituliskan atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya diatas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya

Surakarta, 17 Desember 2018

Penulis



WAHYU WIDODO

PENGAWASAN TERHADAP JAKSA DALAM PELAKSANAAN SISTEM PERADILAN PIDANA

(Studi Putusan Nomor: 08/Pid.sus/TPK/2012/PN.Bdg dan Putusan Nomor: 1147/Pid.B/2009/PN.Jkt.Ut)

Abstrak

Koalisi Pemantau Peradilan (KPP) mencatat setidaknya ada 34 jaksa yang terjerat perkara dugaan korupsi sejak 2006-2017. Dari jumlah tersebut, lima jaksa ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada masa kepemimpinan M Prasetyo sebagai Jaksa Agung. Di Kejaksaan telah terdapat bidang pengawasan di bawah coordinator jaksa agung muda bidang pengawasan dengan dasar hukum Peraturan Jaksa Agung RI Nomor Per-022/A/JA/03/2011 dan Komisi Kejaksaan Sebagai Lembaga Pengawasan eksternal dengan dasar hukum Peraturan Presiden RI Nomor 18 Tahun 2011. Berdasar putusan perkara nomor 1147/Pid.B/2009/PN.Jkt.Ut dan putusan perkara nomor 08/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg dua orang jaksa dinyatakan secara sah terbukti melanggar ketentuan pidana. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif (doktrinal) dengan tipe kajian deskriptif analitis, karena penulis bermaksud menjelaskan terkait objek penelitian yaitu peraturan perundang-undangan tentang pengawasan jaksa dan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap yaitu putusan nomor 1147/Pid.B/2009/PN.Jkt.Ut dan putusan nomor 08/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg. Penulis bermaksud mengetahui bagaimana regulasi pengawasan terhadap jaksa dan pertimbangan majelis hakim menindaklanjuti pelanggaran pidana yang dilakukan jaksa saat menjalankan tugas dalam penanganan perkara pidana di sistem peradilan pidana serta mengetahui bentuk pelanggaran kode etik.

Kata Kunci: regulasi pengawasan, jaksa, pelanggaran pidana, kode etik.

Abstract

Koalisi Pemantau Peradilan (KPP) noted that there were at least 34 prosecutors who were caught in case of alleged corruption from 2006-2017. Of the amount, five prosecutors were arrested by the Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) during M Prasetyo leadership as the attorney general. In the prosecutor's office there has been a field of supervision under the coordination of the young attorney general's regulation number Per-022/A/JA/03/2011 and the prosecutorial commission as an external supervisory institution on the basis of the external legal regulation of the republic of Indonesia. Based on case decision number 1147/Pid.B/2009/PN.Jkt.Ut and case decision number 08/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg two prosecutor are legally proven to have violated criminal provisions. This research uses a normative juridical (doctrinal) approach with descriptive analytical type of study, because the author intends to explain related to the object of research, namely legislation concerning the supervision of prosecutors and court decision with permanent legal force. Namely the decision

number1147/Pid.B/2009/PN.Jkt.Ut and decision number number 08 / Pid. Sus / TPK /2012/PN.Bdg. the author intends to find out how the supervisory regulations on prosecutor and judges deliberations follow up on criminal violations committed by prosecutors while carrying out their duties in handling criminal cases in the criminal justice system and knowing the forms of violations of their ethical codes.

Keywords : control regulation, prosecutor, criminal offense, code of conduct

1. PENDAHULUAN

Bahwa Indonesia yang merupakan negara berkembang telah menempuh garis kebijaksanaan sebagai negara hukum dan bukan negara yang didasarkan kekuasaan semata-mata. Oleh karena itu maka sistem pemerintahan negara berdasarkan penjelasan tentang Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, antara lain menegaskan bahwa negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*) tidak berdasar atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*). Menurut ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republic Indonesia, menyatakan bahwa “kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang”. Dalam menjalankan tugasnya yaitu melakukan penuntutan dan pelaksanaan putusan pengadilan Kejaksaan dijalankan oleh jaksa sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 “Jaksa merupakan pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang”. Didalam sistem Kejaksaan sendiri mengenal dua sistem pengawasan yakni pengawasan internal dan pengawasan eksternal, selanjutnya dalam pengawasan internal terbagi lagi kedalam dua bentuk pengawasan yaitu pengawasan melekat dan pengawasan fungsional. Menurut Handyaningrat pengawasan adalah suatu proses dimana pimpinan ingin mengetahui apakah hasil pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya sesuai dengan rencana, perintah, tujuan atau kebijakan yang telah ditentukan. Koalisi Pemantau Peradilan (KPP) mencatat setidaknya ada 34 jaksa yang terjerat perkara dugaan korupsi sejak 2006-2017. Dari jumlah tersebut, lima jaksa ditangkap Komisi

Pemberantasan Korupsi (KPK) pada masa kepemimpinan M Prasetyo sebagai Jaksa Agung, ditambah tujuh nama lain diamankan oleh tim Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) Polri. Melihat berbagai penyimpangan yang terjadi dan banyaknya jaksa yang terjerat kasus, maka tentu pertanyaan yang timbul ialah bagaimana jalannya sistem pengawasan yang diterapkan terhadap aparatur negara yang fokus pada bidang penuntutan dalam penyelesaian perkara pidana ini.

Pembatasan masalah dalam penulisan skripsi agar tidak menyimpang dari pokok permasalahan maka dibatasi pada analisa mengenai regulasi pengawasan terhadap jaksa dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana dan analisa putusan pengadilan putusan nomor: 08/Pid.sus/TPK/2012/PN.Bdg dan Putusan Nomor: 1147/Pid.B/2009/PN.Jkt.Ut. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1. Bagaimanakah regulasi yang mengatur tentang pengawasan terhadap jaksa dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana di lembaga Kejaksaan?; 2. Bagaimanakah pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap jaksa dan bentuk pelanggaran disiplinnya berdasar putusan nomor: 08/Pid.sus/TPK/2012/PN.Bdg dan Putusan Nomor: 1147/Pid.B/2009/PN.Jkt.Ut telah sesuai hukum yang berlaku?

Tujuan penulisan penulisan ini adalah 1. Mengetahui regulasi yang mengatur mengenai pengawasan terhadap jaksa dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana di lembaga Kejaksaan; 2. Mengetahui pertimbangan majelis hakim terhadap kasus yang menjerat jaksa dan bentuk pelanggaran atau penyimpangan kode etik yang dilakukan oleh jaksa dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana berdasar putusan nomor: 08/Pid.sus/TPK/2012/PN.Bdg dan Putusan Nomor: 1147/Pid.B/2009/PN.Jkt.Ut.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan *yuridis normative atau doktrinal* yaitu penelitian atas suatu hukum atau norma yang dikonsepskan dan dikembangkan atas dasar doktrin yang dianut oleh pengkonsep dan pengembangnya. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang

menjadi objek penelitian, demikian juga dalam penerapannya oleh hakim dalam putusan pengadilan. Dalam penelitian ini penulis hanya menggunakan data sekunder, data sekunder terdiri atas bahan hukum primer sebagai berikut: Putusan nomor :08/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg dan Putusan nomor: 1147/Pid.B/2009/PN.Jkt.Ut. Dalam penelitian penulis awali dengan melakukan inventarisasi peraturan perundang-undangan baik secara vertical maupun secara horizontal. Dalam penulisan penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif, maka untuk menjawab rumusan pertama penulis melakukan sinkronisasi norma secara vertical maupun horizontal, sedangkan untuk rumusan kedua menggunakan analisis deskriptif terhadap putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang dijadikan objek dalam penelitian ini.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Regulasi yang Mengatur Tentang Pengawasan Terhadap Jaksa dalam Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana

Dalam hal ini penulis membahas regulasi yang mengatur terkait pengawasan jaksa yang mana ada beberapa regulasi yang telah dikeluarkan sebagai pedoman pelaksanaan pengawasan jaksa yang selanjutnya akan penulis analisa.

Bahwa antara satu regulasi dengan regulasi lainnya merupakan suatu peraturan yang memiliki hubungan saling melengkapi ataupun juga mendasari peraturan yang dibentuk setelahnya. Dibentuknya instruksi presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1983 dan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1989 merupakan pedoman dari pelaksanaan pengawasan melekat dan fungsional di beberapa lembaga pemerintah dan aparatur negara yang didalamnya juga termasuk kejaksaan. Dalam kedua peraturan tersebut menjelaskan terkait mekanisme pelaksanaan pengawasan melekat dan fungsional secara umum, yang nantinya mengilhami pembentukan regulasi pengawasan secara khusus di masing-masing lembaga. Selanjutnya dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per-006/A/JA/07/2017 merupakan peraturan yang mengatur terkait struktur organisasi kejaksaan dan juga tugas dan wewenang masing-masing divisinya.

Didalamnya juga termasuk struktur organisasi dari jaksa agung muda pengawasan serta pembagian tugasnya dalam pelaksanaan pengawasan. Selanjutnya dalam Peraturan Jaksa Agung Republic Indonesia Nomor Per-022/A/JA/03/2011 sebagai peraturan yang mengatur mekanisme pelaksanaan pengawasan terhadap seluruh jajaran di lingkungan kejaksaan. Bahwa pengawasan melekat dan pengawasan fungsional yang dijalankan oleh jaksa agung muda bidang pengawasan bersama jajarannya serta masing-masing atasan langsung di setiap tingkatan. Jika melihat ketentuan dalam regulasi ini bahwa pengawasan ditujukan kepada seluruh jaksa dan pegawai kejaksaan maka pejabat pengawasan juga termasuk dalam objek pengawasan. Namun bagaimana mekanisme pengawasan terhadap pejabat pengawasan tidak diatur secara jelas dalam peraturan ini, dan juga apakah ada evaluasi kinerja apabila terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh jaksa atau pegawai kejaksaan dan hal tersebut diketahui lebih dulu oleh lembaga penegak hukum lain. Hal ini menjadi penting karena sebagai pejabat pengawasan internal seharusnya lebih mudah untuk melakukan pengawasan karena mereka memiliki wewenang untuk itu. Sehingga sebelum suatu pelanggaran terungkap keluar atau ditemukan aparat penegak hukum lain, pejabat pengawasan internal seharusnya lebih dulu menemukan dan mengetahui adanya indikasi pelanggaran tersebut. Ketika suatu pelanggaran ditemukan oleh aparat penegak hukum lain berarti ada yang salah dengan kinerja dari pejabat pengawasan internal. Sehingga menurut penulis hal ini perlu diatur dan ditetapkan bagaimana penyelesaiannya ketika kondisi semacam ini terjadi.

Selanjutnya Peraturan Presiden Republic Indonesia Nomor 18 Tahun 2011 yang merupakan dasar hukum dibentuknya komisi kejaksaan sebagai sebuah lembaga independen yang dibentuk khusus oleh presiden, dalam wewenangnya melakukan pengawasan terhadap jaksa komisi kejaksaan berkedudukan pejabat pengawasan eksternal. Sebagai lembaga pengawasan eksternal diharapkan komisi kejaksaan dapat bersinergi dengan pejabat pengawasan internal dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan wewenang jaksa. Sehingga komisi

kejaksaan memiliki wewenang untuk melakukan pemeriksaan terhadap jaksa dan juga meminta data/dokumen kepada jaksa maupun pegawai kejaksaan. Namun komisi kejaksaan juga memiliki wewenang khusus ketika aparat pengawasan internal tidak dapat diajak berkoordinasi dalam pelaksanaan pengawasan maka komisi kejaksaan berwenang mengambil alih sepihak proses pengawasan dari aparat pengawasan internal. Hal inilah yang menjadi potensi konflik antara aparat pengawasan internal dengan komisi kejaksaan, akan tetapi menurut penulis keberadaan regulasi pada klausula tersebut adalah baik untuk memberikan sebuah tekanan ataupun teguran kepada aparat pengawasan internal ketika pelaksanaan pemeriksaan dalam pengawasan terlalu berlarut-larut atau tidak menunjukkan perkembangan.

3.2 Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Dalam Memutuskan Tuntutan Pidana Terhadap Jaksa Dalam Putusan No. 1147/Pid.B/2009/Pn.Jkt.Ut dan Putusan No. 08/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg.

Berdasarkan analisa penulis atas pertimbangan-pertimbangan hukum dari majelis hakim dalam putusan nomor 1147/Pid.B/2009/PN.Jkt.Ut dapat diketahui bahwa dalam perkara *a quo* mempertimbangkan unsur-unsur dalam pasal 71 ayat (1) jo Pasal 62 jo Pasal 60 ayat (4) undang-undang nomor 5 tahun 1997. Dalam pasal tersebut mengandung unsur barangsiapa, telah bersepakat dan tanpa hak menyimpan dan/atau membawa psykotropika, bersepakat menyerahkan psykotropika, secara bersama-sama .Majelis hakim berpendapat kata Barang Siapa adalah untuk menunjuk “Subyek Hukum” yaitu orang-orang atau yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana dan didudukan didepan persidangan. Sementara dalam pertimbangan majelis hakim pada perkara pidana yang lain, majelis hakim memberikan penafsiran yang hampir sama terkait maksud dari kata barangsiapa dimana yang dimaksud dengan barangsiapa ialah orang sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan melawan hukum. Namun dalam hal ini penulis kurang sepakat dengan majelis hakim, karena menurut penulis benar bahwa para terdakwa hakikatnya sebagai seorang manusia/orang adalah subyek hukum, Menurut penulis

unsur subyektif dalam suatu tindak pidana tidak serta merta lepas dari unsur obyektifnya. Oleh karena itu untuk menetapkan unsur subyektif suatu tindak pidana terpenuhi atau tidak maka harus lebih dulu melihat pada unsur obyektifnya terpenuhi atau tidak.

Dalam unsur Telah bersepakat dan tanpajak menyimpan dan/atau membawa Psikotropika Golongan II penulis sepakat dengan majelis hakim. Sifat melawan hukum formil berarti suatu perbuatan adalah bersifat melawan hukum apabila perbuatan itu telah mencocoki larangan undang-undang. Letak melawan hukumnya perbuatan sudah ternyata dari sifat melanggar ketentuan undang-undang. Dalam proses persidangan terungkap fakta-fakta dimana diantara terdakwa I dan terdakwa II telah terjadi sebuah kesepakatan dengan kesadaran untuk menyimpan dan/atau membawa psikotropika dan hal tersebut diakui oleh masing-masing terdakwa dihadapan majelis hakim. Selanjutnya klausula tanpa hak menyimpan dan/atau membawa psikotropika golongan II terbukti dengan keterangan saksi VIII dan IX yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa I dan Penangkapan terhadap terdakwa II. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.467/KNF/2009 dengan kesimpulan barang bukti tablet warna hijau tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan II Nomor Urut 9 Lampiran Undang-undang RI No. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika.

Bahwa dalam unsur bersepakat untuk menyerahkan psikotropika penulis menyatakan sepakat dengan pertimbangan majelis hakim, meskipun sebenarnya dibalik pernyataan ini masih terdapat keraguan. Suatu hal yang penulis sempat ragukan ialah tidak adanya alat bukti langsung yang membuktikan terjadinya penyerahan atau penukaran barang bukti antara terdakwa III dengan terdakwa II dan hal ini disadari pula oleh majelis hakim. Dengan dasar doktrin *mens rea* maka dalam memidanakan seseorang harus memenuhi dua syarat, yaitu ada perbuatan lahiriah yang terlarang/perbuatan pidana (*actus reus*) dan ada sikap batinjahat/tercela (*mens rea*). Dalam perkara ini secara fisik tidak ada perbuatan melawan hukum yang

dilakukan terdakwa III dan terbukti secara langsung. Majelis hakim menjatuhkan pertimbangan hukum demikian lebih kepada suatu kondisi tertentu yang menyertai suatu perbuatan yang memberatkan posisi terdakwa III. Sehingga meskipun tiada suatu perbuatan penyerahan yang terbukti secara langsung telah dilakukan oleh terdakwa III, namun adanya kondisi yang memberatkan posisi terdakwa III seperti halnya penulis jelaskan dalam fakta-fakta persidangan diatas dan sebaliknya tidak ada alat bukti yang dapat digunakan untuk membantah hal yang memberatkan tersebut. Menurut penulis pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa IV telah sesuai dengan norma, karena tiada satupun unsur dalam Pasal yang didakwakan padanya terbukti atau terpenuhi selama persidangan dan tidak adanya saksi yang menyatakan adanya keterlibatan terdakwa dalam perkara ini. Menurut Roeslan Saleh menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan objektif yang ada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Sekalipun perbuatan yang dilarang telah dilakukan seseorang, namun jika orang tersebut tidak dapat dicela karena pada dirinya tidak terdapat kesalahan, maka pertanggungjawaban tidak mungkin ada. Maka pertimbangan majelis hakim dengan membebaskan terdakwa IV dari segala dakwaan merupakan suatu hal yang paling tepat.

Berdasarkan analisa penulis atas pertimbangan-pertimbangan hukum dari majelis hakim dalam putusan nomor 08/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg dapat diketahui bahwa dalam perkara a quo mempertimbangkan unsur-unsur dalam Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam pasal tersebut mengandung unsur pegawai negeri atau penyelenggara negara, menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya dan secara bersama-sama.

Penulis menyatakan sepakat dengan pertimbangan majelis hakim dalam hal pemenuhan unsur “pegawai negeri atau penyelenggara negara”. Hal ini atas terbuktinya terdakwa sebagai jaksa berdasar Surat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia nomor : KEP-1-001/C.4/01/2001 tanggal 16 Januari 2001. Selanjutnya berdasar Pasal 9 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 dan penjelasan Pasal 2 Angka 7 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa jaksa termasuk dalam pegawai negeri atau penyelenggara negara. Dalam unsur “menerima hadiah atau janji” penulis sepakat dengan pertimbangan majelis hakim, menurut jurisprudensi “hadiah” berarti sesuatu pemberian berupa barang, uang atau jasa, bahwa terwujudnya perbuatan menerima hadiah disyaratkan hadiah itu telah beralih ke dalam kekuasaan orang yang menerima dan pada saat itu ada indikator fisik. Bahwa berdasarkan fakta persidangan terdakwa pada 21 November 2011 telah terjadi sebuah kesepakatan antara terdakwa dengan saksi V Anton, setelah menawarkannya kepada saksi VI Edward. Dalam kesepakatan tersebut bahwa tuntutan dikurangi menjadi 8 bulan dengan syarat memberikan uang sejumlah 150 juta rupiah. Karena saksi VI baru membawa uang 100 juta rupiah, dalam kesepakatan tersebut juga disepakati bahwa uang yang diberikan baru 100 juta, dan sisanya dijanjikan akan diberikan esok pagi di sebuah bengkel yang terdakwa tentukan. Selanjutnya Saksi V Anton memasukan sejumlah uang yang disepakati yaitu 100 juta ke dalam mobil Nissan X-Trail milik terdakwa dengan dibungkus amplop dan dimasukkan dalam kresek warna putih. Dalam unsur “padahal diketahui atau patut diduga hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya” penulis juga sepakat. Bahwa adanya kesepakatan untuk memberikan tuntutan 8 (delapan) bulan untuk saksi VI Edward dengan memberikan uang sejumlah Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah). Bahwa dengan demikian Majelis berpendapat bahwa terdakwa telah mengetahui atau patut menduga hadiah berupa bungkus plastik warna putih yang berisi uang sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) diberikan untuk

menggerakkan agar terdakwa melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Moeljatno bahwa syarat batin “disadari” harus dipahami sebagai bagian dari perbuatan disamping sikap jasmani/lahiriah. Berdasarkan uraian fakta-fakta yaitu rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Epiyarti, SH antara lain melakukan penundaan persidangan, padahal yang bersangkutan sudah mengetahui pada saat itu surat tuntutan telah siap dibacakan. Selain itu Saksi VII Epiyarti telah menggerakkan Edward M Bunjamin bersama-sama dengan Anton Bambang Hadyono menemui terdakwa. Meskipun dari fakta persidangan perbuatan saksi VII Epiyarti tidak memenuhi unsur delik Pasal 12 a, akan tetapi perbuatan saksi VII Epiyarti membantu terwujudnya seluruh unsur delik bagi terdakwa. Sementara Untuk terdakwa sendiri penulis berpendapat karena perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur Pasal 12 a, maka terdakwa disini sebagai *pleger* (pelaku). Sehingga penulis menyatakan dalam unsur secara bersama-sama sepakat dengan pertimbangan majelis hakim.

3.3 Bentuk penyimpangan atau pelanggaran kode etik yang dilakukan jaksa berdasar putusan nomor 1147/Pid.B/2009/PN.Jkt.Ut dan Putusan Nomor 08/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg

Bahwa perbuatan masing-masing terdakwa dalam putusan nomor 1147/Pid.B/2009/PN.Jkt.Ut dan Putusan Nomor 08/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg berdasarkan fakta persidangan yang telah terbukti dan penulis jelaskan diatas, masing-masing terdakwa telah melanggar ketentuan dalam kode perilaku jaksa yaitu pasal 7 ayat (1): Memberikan atau menjanjikan sesuatu yang dapat memberikan keuntungan pribadi secara langsung maupun tidak langsung bagi diri sendiri maupun orang lain dengan menggunakan nama atau cara apapun, Meminta dan/atau menerima hadiah dan/atau keuntungan dalam bentuk apapun dari siapapun yang memiliki kepentingan baik langsung maupun tidak langsung.

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Bahwa regulasi pengawasan yang ada saat ini dikeluarkan untuk memaksimalkan pengawasan di lingkungan kejaksan, terlepas masih adanya tumpang tindih kewenangan dalam regulasi pengawasan internal dan eksternal selebihnya menurut penulis sudah cukup baik tinggal implemantasinya dari masing-masing pejabat pengawasan.

Bahwa dalam putusan nomor 1147/Pid.B/2009/PN.Jkt.Ut penulis menyatakan sepenuhnya sepakat karena telah terpenuhinya keseluruhan unsur dalam pasal 71 ayat (1) jo Pasal 62 Jo Pasal 50 ayat (4) Undang-undang Nomor 5 tahun 1997. Selanjutnya dalam putusan nomor 08/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg penulis juga sepenuhnya sepakat karena perbuatan terdakwa juga telah memenuhi seluruh unsur dalam pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang nomor 20 tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Disamping pelanggaran pidana para terdakwa juga melanggar ketentuan dalam kode perilaku jaksa pasal 7 ayat (1) huruf a dan huruf b Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per-014/A/JA/11/2012.

4.2 Saran

Kepada setiap pejabat pengawasan diharapkan dapat mengimplementasikan regulasi pengawasan yang ada saat ini dengan sebaik-baiknya dan dapat bersinergi dengan sebaik-baiknya pula dalam melaksanakan tugas pengawasan. Kepada setiap jajaran jaksa jadilah penegak hukum yang jujur, adil dan amanah dalam mengemban tugas dan tanggungjawab. Kepada seluruh jajaran aparat penegak hukum dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana dapat menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya dan menindak setiap pelaku tindak pidana dengan sama rata di depan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Amrani dan Mahrus Ali, 2015, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana (Perkembangan Dan Penerapan)*, PT Raja Grafindo: Jakarta

- Gunawan, Ilham, 1994, *Peran Kejaksaan Dalam Menegakkan Hukum Dan Stabilitas Politik*, Jakarta : Sinar Grafika
- Irianto, Sulistyowati dan Shidarta, 2009, *Metode Penelitian Hukum (konstelasi dan refleksi)*, Jakarta : Yayasan Obor Indonesia
- Moeljatno, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta: Jakarta
- Muntaha, H., 2017, *Hukum Pidana Malapraktik (pertanggungjawaban dan penghapusan pidana)*, Sinar Grafika: Jakarta
- Sudaryono dan Natangsa surbakti, 2017, *Hukum Pidana (Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasar KUHP dan Ruu KUHP)*, Muhammadiyah University Press: Surakarta
- Zainuddin Ali, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republic Indonesia
- Undang-undang nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara yang bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme
- Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per-014/A/JA/11/2012 Tentang Kode Perilaku Jaksa
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Komisi Kejaksaan Republik Indonesia
- Priyo Budiharto Dkk, Analisis Kebijakan Pengawasan Melekat Di Badan Pengawas Provinsi Jawa Tengah, Dialogue Jurnal Ilmu Administrasi Dan Kebijakan Public
- <http://www.horassumutnews.com/2017/08/04/memalukan-sudah-34-jaksa-yang-terjerat-perkara-kasus-korupsi/>